



Domestic Fragility as Geopolitical Vector: Nepal's Lessons for Indonesia's Middle Power Strategic Autonomy

Kerapuhan Domestik sebagai Vektor Geopolitik: Pelajaran Nepal bagi Otonomi Strategis Middle Power Indonesia

Anisa Cikal Rambu Basaey

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Anisa Cikal Rambu Basaey

✉ anisacikalrambubasaey0108@gmail.com

History:

Submitted: 13-01-2026

Revised: 22-02-2026

Accepted: 28-02-2026

Keyword:

Strategic Autonomy, Domestic Fragility, Geopolitical Vector, Middle Power, Ketahanan Nasional.

Kata Kunci:

Otonomi Strategis, Kerapuhan Domestik, Vektor Geopolitik, Middle Power, Ketahanan Nasional.

Abstract

This study examines the phenomenon of domestic fragility as a geopolitical vector, using Nepal's buffer state experience to derive critical strategic lessons for Indonesia's middle power strategic autonomy in the context of intensifying Great Power Competition (GPC) in the Indo-Pacific. Nepal's recent political instability, marked by youth-led "Gen Z protests," was fundamentally triggered by deep-seated governance failures, including endemic corruption, stark social inequality ("nepo-kids" phenomenon), and a massive youth unemployment crisis. These socio-economic grievances served as a 'soft entry point' for external geopolitical exploitation, as seen in the rivalry over the U.S.'s Millennium Challenge Corporation (MCC) and China's Belt and Road Initiative (BRI). The core finding for Indonesia is that robust socio-economic resilience aligned with the Economic and Social-Cultural Pillars of Indonesia's Ketahanan Nasional (National Resilience) is the most vital component for geopolitical defense. The study argues that internal stability, clean governance, and effective absorption of the youth bulge must be prioritized to prevent external actors from exploiting domestic dissatisfaction, thereby preserving Indonesia's strategic autonomy and middle power status amidst GPC.

Abstrak

Studi ini mengkaji fenomena kerapuhan domestik sebagai vektor geopolitik, menggunakan pengalaman buffer state Nepal untuk menarik pelajaran strategis kritis bagi otonomi strategis middle power Indonesia di tengah Persaingan Kekuatan Besar (GPC) yang semakin intensif di Indo-Pasifik. Instabilitas politik Nepal baru-baru ini, ditandai dengan "protes Gen Z" yang dipimpin pemuda, secara fundamental dipicu oleh kegagalan tata kelola yang mengakar, termasuk korupsi endemik, kesenjangan sosial yang mencolok (fenomena "nepo-kids"), dan krisis pengangguran pemuda yang masif. Keluhan sosial-ekonomi ini berfungsi sebagai 'titik masuk lunak' bagi eksploitasi geopolitik eksternal, yang terlihat dalam persaingan atas Millennium Challenge Corporation (MCC) A.S. dan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Temuan inti bagi Indonesia adalah bahwa resiliensi sosial-ekonomi yang kuat sejalan dengan Pilar Ekonomi dan Sosial-Budaya Ketahanan Nasional Indonesia adalah komponen paling vital untuk pertahanan geopolitik. Studi ini berpendapat bahwa stabilitas internal, tata kelola yang bersih, dan penyerapan youth bulge secara efektif harus diprioritaskan untuk mencegah aktor eksternal mengeksploitasi ketidakpuasan domestik, sehingga menjaga otonomi strategis dan status middle power Indonesia di tengah GPC.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lanskap geopolitik Indo-Pasifik saat ini semakin didefinisikan oleh intensifikasi Persaingan Kekuatan Besar (*Great Power Competition* – GPC), terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok [1]. Rivalitas ini menciptakan tantangan strategis yang kompleks bagi negara-negara kecil dan yang terletak di posisi geografis yang sensitif. Nepal, diapit secara strategis antara dua raksasa Asia, Tiongkok dan India, berfungsi sebagai contoh klasik dari sebuah *buffer state*. Sepanjang sejarahnya, Nepal dipaksa untuk menjalankan tindakan penyeimbangan diplomatik yang cermat demi menjaga kedaulatan dan keamanannya di tengah ambisi strategis tetangganya [2].

Berbeda dengan posisi Nepal, Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai *middle power*. Kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk secara proaktif membangun tatanan regional berbasis aturan (*rules-based regional order*), utamanya melalui peran sentralitas ASEAN dan inisiatif seperti Bali Democracy Forum [3]. Perbedaan antara *buffer state* yang reaktif seperti Nepal dan *middle power* yang proaktif seperti Indonesia sangat penting. Meskipun Indonesia berupaya membentuk lingkungan regional, instabilitas politik internal yang parah di negara tetangga regional seperti Nepal menyajikan pelajaran strategis kritis mengenai bagaimana kerapuhan internal dapat dengan cepat menjadi vektor eksploitasi geopolitik eksternal, yang berpotensi melemahkan otonomi strategis negara mana pun.

Nepal baru-baru ini mengalami gejolak politik signifikan, yang ditandai oleh protes massa yang dipimpin oleh pemuda sering disebut sebagai "Gen Z protest" yang memicu kekerasan, menyebabkan beberapa korban jiwa (antara 15 hingga 19 orang), dan berakhir dengan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Meskipun pemicu awal protes adalah larangan penggunaan platform media sosial, akar penyebab ketidakpuasan terletak pada kegagalan sosio-ekonomi yang mendalam [4]. Keluhan ini mencakup korupsi yang meluas, kesenjangan sosial yang mencolok (seperti fenomena viral '*nepo-kids*' atau anak-anak politisi yang memamerkan kemewahan), dan pengangguran pemuda yang masif [5].

Kekacauan domestik yang membara ini menjadi terkait erat dengan kerentanan geopolitik Nepal. Instabilitas internal menjadikan negara tersebut lahan subur bagi intervensi asing, khususnya melalui persaingan proyek infrastruktur dan bantuan, seperti Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat dan Belt and Road Initiative

(BRI) Tiongkok [6]. Analisis menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola domestik berfungsi sebagai 'titik masuk lunak' bagi aktor eksternal, mengubah perdebatan politik internal menjadi pertempuran proksi untuk rivalitas global.

Studi ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis inti untuk menyediakan analisis multidimensi. Pertama, konsep Ketahanan Negara (*State Resilience*) dan khususnya Ketahanan Nasional (Ketannas) Indonesia memberikan kerangka normatif untuk rekomendasi kebijakan [7]. Ketannas adalah konsep holistik yang mengintegrasikan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan (Ipoleksosbudhankam) [8]. Ketahanan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk bertahan, menyerap, dan pulih dari guncangan internal maupun eksternal [9].

Kedua, Schizoanalysis, yang dikembangkan oleh Gilles Deleuze dan Félix Guattari, digunakan untuk memahami navigasi geopolitik Nepal. Kerangka ini menganalisis perbedaan antara *garis molekuler* (faktor domestik, seperti ketidakpuasan sosio-ekonomi dan instabilitas politik) dan *garis molar* (tekanan eksternal, seperti GPC dan rivalitas kekuatan besar). Schizoanalysis menjelaskan bagaimana Nepal menerapkan pendekatan bernuansa terhadap diplomasi dan keamanan melalui proses *detrterritorialization* dan *reterritorialization*, yang mencerminkan upayanya menyeimbangkan tekanan eksternal dengan tuntutan domestik [2].

Ketiga, Teori Stabilitas Hegemonik (HST) diterapkan untuk menafsirkan sifat bantuan asing, khususnya program MCC A.S. HST membantu menguji apakah keterlibatan kekuatan hegemonik murni bersifat pembangunan atau apakah ia menyimpan tujuan strategis untuk mempertahankan keseimbangan regional, terutama terhadap pesaing seperti Tiongkok dan India [10]. Triangulasi teori-teori ini memungkinkan evaluasi kritis tentang bagaimana kerapuhan domestik tingkat mikro memungkinkan intervensi geopolitik tingkat makro.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang Nepal berfokus pada persaingan antara Tiongkok/India dan A.S., atau pada instabilitas internal pasca-konflik menyusul perjanjian damai 2006. Sementara itu, studi mengenai Ketahanan Nasional Indonesia, meskipun komprehensif dalam menjelaskan konsep Ketannas, seringkali tidak memiliki analisis komparatif mendalam terhadap kasus-kasus kegagalan geopolitik akut di kawasan.

Kesenjangan analitis terletak pada kurangnya integrasi antara faktor ekonomi politik tingkat mikro (krisis pemuda dan korupsi) dengan kerentanan geopolitik tingkat makro (dinamika MCC/BRI) dalam konteks komparatif yang relevan bagi *middle power* seperti Indonesia.

Novelty artikel ini terletak pada penyajian *model terintegrasi* yang secara eksplisit menunjukkan bahwa kegagalan sosio-politik yang mengakar di Nepal, seperti ketidakmampuan untuk menyerap *youth bulge*, berfungsi sebagai vektor utama yang memfasilitasi intervensi geopolitik eksternal. Dengan menerapkan pelajaran ini, studi ini secara kritis memperkuat dimensi sosio-ekonomi dari Ketahanan Nasional Indonesia, menegaskan bahwa stabilitas internal yang kuat adalah komponen paling penting dari pertahanan geopolitik.

Penelitian ini mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, instabilitas politik Nepal dipicu oleh kegagalan tata kelola domestik (korupsi endemik dan pengangguran pemuda), yang kemudian diartikan menjadi narasi anti-kemampuan yang mudah diinstrumentalisasi oleh aktor geopolitik eksternal (menggunakan isu MCC/BRI sebagai proksi). Kedua, pelajaran strategis fundamental bagi Indonesia adalah bahwa resiliensi sosial-ekonomi (sejalan dengan Pilar Ekonomi dan Sosial Ketahanan) harus diprioritaskan untuk secara efektif mempertahankan *otonomi strategis* dan status *middle power* Indonesia di tengah GPC yang intens di Indo-Pasifik.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana interaksi antara kerentanan domestik Nepal (korupsi, krisis demografi, dan krisis ekonomi) dengan tekanan geopolitik eksternal (AS, Tiongkok, India) memicu dan memperpanjang instabilitas politik di Nepal?
- b. Pelajaran strategis dan kebijakan spesifik apa yang dapat ditarik oleh Indonesia dari dinamika politik Nepal untuk memperkuat Ketahanan Nasional di tengah Persaingan Kekuatan Besar di kawasan Indo-Pasifik?

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif-Analitis. Desain penelitian distrukturkan sebagai Studi Kasus Komparatif yang berfokus pada Nepal dan menarik implikasinya bagi Indonesia. Analisis kasus Nepal bertujuan mengidentifikasi variabel kausal (X) yang terkait dengan instabilitas politik dan eksploitasi geopolitik, dan variabel-variabel ini kemudian diproyeksikan pada kerangka kebijakan Ketahanan Nasional Indonesia (Y).

Analisis teoretis mengandalkan triangulasi tiga kerangka: (a) *Schizoanalysis*, digunakan untuk memahami strategi diplomatik Nepal yang bernuansa dan defensif dalam menavigasi GPC; (b) *Teori Stabilitas Hegemonik* (HST), diterapkan untuk menilai secara kritis motif dan mekanisme di balik bantuan pembangunan dan pengaruh strategis kekuatan besar; dan (c) Konsep *Ketahanan Nasional* Indonesia, yang berfungsi sebagai model normatif dan struktural untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk artikel jurnal *peer-review*, laporan kebijakan, dan data ekonomi dari institusi internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Anatomi Instabilitas Nepal: Titik Vektor Geopolitik

Gejolak politik terbaru di Nepal adalah hasil dari interaksi kompleks antara kerapuhan domestik yang mengakar (garis molekuler) dan tekanan geopolitik eksternal yang luar biasa (garis molar) [2].

a. Fragilitas Domestik: Korupsi, Demografi, dan Jebakan Remitansi

Nepal bergumul dengan krisis demografi dan ekonomi yang parah. Negara ini mengalami *youth bulge* yang signifikan, dengan sekitar 43% populasi berusia 16–40 tahun, dan 28.3% di bawah usia 30 tahun. Dividen demografi ini, alih-alih menjadi aset, telah berubah menjadi kerentanan strategis karena kegagalan ekonomi dalam menghasilkan lapangan kerja yang memadai. Tingkat pengangguran pemuda mencapai puncaknya pada 20.82% pada tahun 2024, yang memaksa migrasi tenaga kerja massal ke luar negeri [5].

Ketergantungan besar negara pada remitansi asing, yang diperkirakan mencapai 33.1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024, menciptakan ketergantungan struktural [5]. Meskipun remitansi secara teoretis dapat mengurangi korupsi di tingkat lokal karena warga kurang bergantung pada layanan pemerintah yang korup, dalam kasus Nepal, ketergantungan ini menutupi krisis struktural yang lebih dalam. Aliran dana luar negeri ini memungkinkan pemerintah untuk menunda reformasi kelembagaan yang sulit, secara efektif memfasilitasi *ekspor* modal manusia paling produktif alih-alih menyelesaikan masalah tata Kelola [11]. Siklus ini ketergantungan remitansi tinggi yang mengarah pada kegagalan penciptaan lapangan kerja domestik berkualitas, yang berujung pada frustrasi pemuda dan migrasi berkelanjutan membangun ketegangan sosial yang eksplosif

[12].

Krisis ekonomi diperparah oleh korupsi struktural yang meluas. Nepal berada di peringkat 107 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi [12]. Frustrasi populer memuncak ketika video yang mengekspos gaya hidup mewah anak-anak politisi dikenal sebagai "nepo-kids" menjadi viral, menciptakan kontras tajam dengan perjuangan rakyat biasa [5]. Tingkat korupsi yang tinggi ini secara fundamental mengikis kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah, yang merupakan prasyarat penting yang memungkinkan intervensi asing. Ketika warga negara kehilangan kepercayaan pada institusi mereka, mereka menjadi sangat rentan terhadap disinformasi dan mudah dimobilisasi oleh aktor geopolitik eksternal yang sering membingkai intervensi mereka sebagai koreksi terhadap tata kelola yang buruk [13].

b. Kerentanan Geopolitik Eksternal (GPC)

Posisi Nepal sebagai negara *landlocked* yang terjepit antara Tiongkok dan India menjadikannya laboratorium geopolitik. Analisis *schizoanalysis* menyoroti diplomasi bernuansa Nepal, yang bertujuan mencapai otonomi strategis dengan menyeimbangkan rivalitas kekuatan besar, meskipun negara itu menghadapi tekanan struktural untuk berpihak [2]. Dua contoh paling jelas dari tekanan eksternal ini adalah inisiatif infrastruktur yang bersaing: Millennium Challenge Corporation (MCC) yang dipimpin A.S. dan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok.

Kontroversi MCC berpusat pada hibah \$500 juta dari A.S., yang sangat diperdebatkan dalam wacana publik Nepal, dan sering dikarakterisasi sebagai instrumen Strategi Indo-Pasifik A.S. Meskipun A.S. menyangkal hal ini dan mengklarifikasi bahwa Konstitusi Nepal berlaku di atas MCC Compact, kekhawatiran kedaulatan tetap tinggi. Sebuah klausul yang menyatakan bahwa Compact akan 'berlaku atas undang-undang domestik' dalam kasus konflik tertentu menjadi titik pertentangan yang kritis. Perdebatan ini memicu perpecahan politik domestik yang intens, menunjukkan bahwa bantuan pembangunan eksternal, ketika dianalisis melalui lensa HST, dapat berfungsi sebagai alat pengaruh strategis yang memperburuk keadaan ketika tata kelola internal sudah rapuh [10].

Secara paralel, Tantangan BRI menyoroti keterlibatan Nepal dengan Tiongkok. Nepal menandatangani sembilan proyek di bawah kerangka BRI pada tahun 2017.³ Namun, tujuh tahun kemudian, tidak ada proyek BRI yang selesai, dengan

penundaan signifikan di sektor-sektor kritis. Proyek raksasa seperti Kereta Api Trans-Himalaya dianggap terlalu mahal (mendekati 10% PDB Nepal) dan menimbulkan kekhawatiran jebakan utang (*loan trap*) dan ketidakseimbangan strategis, di mana manfaat strategis lebih condong ke Tiongkok [6].

Menambah kompleksitas adalah Pengaruh Regional India yang meresap. Gesekan diplomatik sering muncul dari sengketa perbatasan dan tata kelola sumber daya air lintas batas, di mana Nepal sering merasa dirugikan oleh posisi dominan India [14]. Yang penting, politisi domestik Nepal memanfaatkan sentimen anti-India yang kuat terutama pasca blokade 2015 sebagai alat ampuh untuk mobilisasi elektoral. Instabilitas internal ini membuat kebijakan luar negeri menjadi instrumen persaingan politik elektoral [15].

2. Pelajaran Geopolitik Regional bagi Ketahanan Nasional Indonesia

Kasus Nepal memberikan pelajaran strategis penting bagi Indonesia yang berupaya mempertahankan status *middle power* dan mengamankan Ketahanan Nasionalnya di kawasan Indo-Pasifik yang diperebutkan. Analisis menegaskan bahwa Pilar Ekonomi dan Sosial-Budaya Ketannas harus diperlakukan sebagai garis pertahanan geopolitik terdepan Indonesia.

a. Pelajaran I: Ketahanan Sosial-Ekonomi sebagai Garis Pertahanan Geopolitik

Indonesia harus secara proaktif mencegah risiko yang terkait dengan populasi mudanya yang besar. Jika kegagalan tata kelola menyebabkan *youth bulge* Indonesia berubah menjadi *beban demografi* yang ditandai dengan pengangguran dan ketidakpuasan, frustrasi sosial ini dapat menjadi basis bagi disrupsi politik, yang sangat rentan terhadap eksploitasi GPC [4]. Investasi harus difokuskan secara ketat pada penciptaan lapangan kerja domestik berkualitas tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada migrasi atau remitansi, sehingga memastikan energi demografi berkontribusi positif pada Ketahanan Ekonomi [12].

Selanjutnya, memperkuat Pilar Tata Kelola adalah keharusan strategis. Korupsi endemik di Nepal adalah katalisator untuk mobilisasi massa dan keruntuhan legitimasi negara [12]. Bagi Indonesia, memerangi korupsi dan ketimpangan sosial sangat penting untuk menjaga legitimasi pemerintah (Pilar Politik Ketannas). Ketika legitimasi negara dikompromikan oleh korupsi, hal itu menciptakan kelemahan mendasar yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan

eksternal untuk melemahkan peran Indonesia sebagai *middle power* [3].

b. Pelajaran II: Otonomi Strategis dalam Keterlibatan Bantuan Asing

Kontroversi MCC di Nepal mengenai klausul yang berpotensi melangkahi Konstitusi berfungsi sebagai peringatan tajam bagi Indonesia. Saat menghadapi investasi atau bantuan internasional berskala besar, Indonesia harus memastikan bahwa kedaulatan hukumnya tetap absolut. Ini menuntut penegasan eksplisit bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum nasional *selalu* memiliki supremasi atas perjanjian internasional, tanpa pengecualian.

Selain itu, polarisasi domestik yang dipicu oleh MCC dan BRI di Nepal menggarisbawahi pentingnya konsensus nasional yang kuat sebelum meratifikasi proyek mega-strategis. Tanpa konsensus Ipoleksosbudhankam yang luas, inisiatif eksternal berisiko dipersenjatai sebagai alat untuk fragmentasi politik domestik. Indonesia harus memanfaatkan status *middle power* untuk menuntut persyaratan pendanaan yang menguntungkan (mendahulukan hibah di atas pinjaman) dan memastikan proyek tersebut 100% selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang (Pilar Ekonomi Ketannas).

c. Pelajaran III: Ketahanan Informasi dan Kohesi Sosial

Kasus Nepal menunjukkan bahwa ruang informasi adalah medan perang baru. Disinformasi menyebar enam kali lebih cepat daripada informasi akurat, dan geopolitik modern beroperasi melalui eksploitasi polarisasi domestik. Adanya tuduhan mobilisasi akademisi, politisi, dan media lokal oleh aktor asing di Nepal menunjukkan bahwa intervensi tidak lagi bersifat tradisional [16].

Bagi Indonesia, ini menuntut penguatan Ketahanan Informasi (Pilar Sosial-Budaya Ketannas). Strategi harus berfokus pada peningkatan literasi digital (diidentifikasi 78% efektif melawan disinformasi). Yang krusial, Indonesia harus menjaga kohesi sosial yang kuat untuk mencegah polarisasi politik dieksploitasi oleh kekuatan eksternal, memastikan visi kesatuan *Wawasan Nusantara* tetap relevan [16].

C. KESIMPULAN

Gejolak politik di Nepal membuktikan tesis bahwa fragilitas domestik terutama yang disebabkan oleh korupsi struktural, elit oligarkis, dan kegagalan menyerap potensi

youth bulge adalah vektor utama yang memungkinkan dan memperkuat intervensi geopolitik eksternal (melalui proyek seperti MCC dan BRI). Kasus Nepal menunjukkan bahwa kekuatan besar tidak perlu memaksa masuk jika pintu sudah terbuka oleh ketidakpuasan internal. Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat krusial: Untuk mempertahankan peran sebagai *middle power* yang berdaulat dan untuk memperkuat Ketahanan Nasional di tengah Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik, prioritas strategis harus bergeser dari sekadar pertahanan militer atau diplomasi ke penguatan Ketahanan Sosial-Ekonomi yang fundamental, tata kelola yang bersih, dan literasi informasi yang tinggi, menjamin bahwa kedaulatan Indonesia berakar kuat pada legitimasi publik dan konsensus internal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Zhou, *Great Power Competition as the New Normal of China–US Relations*. Cham: Springer International Publishing, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-09413-2.
- [2] S. P. Subedi, "Post-Conflict Constitutional Settlement in Nepal and The Role of The United Nations," in *The dynamics of constitutionalism in the age of globalisation*, 2010, pp. 71–87. doi: 10.1007/978-90-6704-521-6_5.
- [3] B. J. Nanda, "Uncover the Indonesia Middlepowermanship: When Indonesia find the Middle Power Moment?," *Freq. Int. Relations*, vol. 5, no. 1, pp. 23–50, Jun. 2023, doi: 10.25077/fetrian.5.1.23-50.2023.
- [4] SpecialEurasia OSINT Team, "Protests and Political Crisis in Nepal: Intel Brief," SpecialEurasia OSINT Team. [Online]. Available: <https://www.specialeurasia.com/2025/09/10/nepal-protest-crisis/>
- [5] I. Sevea, "From Protests to Political Vacuum: Unpacking Nepal's Unrest," Institute of South Asian Studies. [Online]. Available: <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/from-protests-to-political-vacuum-unpacking-nepals-unrest/>
- [6] Indira Prasain, "The Belt and Road Initiative: Assessing Its Implications for Nepal's Development," *Interdiscip. J. Manag. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 2, pp. 102–113, Sep. 2024, doi: 10.3126/ijmss.v5i2.69449.
- [7] E. Torabi, A. Dedekorkut-Howes, and M. Howes, "A framework for using the concept of urban resilience in responding to climate-related disasters," *Urban Res. Pract.*, vol. 15, no. 4, pp. 561–583, Aug. 2022, doi: 10.1080/17535069.2020.1846771.
- [8] M. Salsabila, Z. Slam, M. N. Alamsyah, and H. D. Hilmi, "National Resilience in Historical and Geostrategic Perspectives: Essence and Conception," *J. Lemhannas RI*, vol. 12, no. 4, pp. 435–450, Dec. 2024, doi: 10.55960/jlri.v12i4.956.
- [9] J. M. Morse *et al.*, "Developing the Resilience Framework for Nursing and Healthcare," *Glob. Qual. Nurs. Res.*, vol. 8, Jan. 2021, doi: 10.1177/23333936211005475.
- [10] D. P. Lamichhane, "Changing dynamics of the U.S.–Nepal policy: An analysis through the lens of hegemonic stability theory," *Nepal Public Policy Rev.*, vol. 5, pp. 43–91, Jul. 2025, doi: 10.59552/nppr.v5i1.90.

- [11] M. D. Tyburski, "Curse or Cure? Migrant Remittances and Corruption," *J. Polit.*, vol. 76, no. 3, pp. 814–824, Jul. 2014, doi: 10.1017/S0022381614000279.
- [12] Tribun Singkawang, "3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal yang Buat Pemerintahan Kolaps," 2025. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=wKACZoUBLJc>
- [13] M. Suvedi, "The Level of Corruption in Democratic Republic of Nepal: An In-depth Analysis of Root Causes, Governance Impact, and Potential Solutions," *Contemp. Res. An Interdiscip. Acad. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 39–58, Jun. 2024, doi: 10.3126/craiaj.v7i1.67252.
- [14] T. N. Baral, "Border Disputes and Its Impact on Bilateral Relation: A Case of Nepal-India International Border Management," *J. APF Command Staff Coll.*, vol. 1, no. 1, pp. 28–36, Dec. 2018, doi: 10.3126/japfcsc.v1i1.26710.
- [15] D. R. Bagale, "Nepal–India water cooperation: consequences of mutuality or hegemony?," *Water Policy*, vol. 22, no. 6, pp. 1098–1108, Dec. 2020, doi: 10.2166/wp.2020.135.
- [16] D. Surjatmodjo, A. A. Unde, H. Cangara, and A. F. Sonni, "Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience," *Soc. Sci.*, vol. 13, no. 8, p. 418, Aug. 2024, doi: 10.3390/socsci13080418.